

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KEL.
SALOTELLUE KEC. WARU TIMUR KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Diajukan oleh,

NURMAYANTI
NIM 14.16.4.0104

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KEL.
SALOTELLUE KEC. WARU TIMUR KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonom(S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Diajukan oleh,

**NURMAYANTI
NIM 14.16.4.0104**

Dibimbing Oleh :

- 1. Ilham, S.Ag.,M.A**
- 2. Dr. Takdir, SH.,MH**

Diuji Oleh :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmayanti

NIM : 14.16.04.0104

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran tersebut.

Palopo, Maret 2018



Nurmayanti

NIM 14.16.04.0104

yataan

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kel. Salotellue Kec. Wara Timur Kota Palopo" yang ditulis oleh Nurmayanti, dengan NIM 14.16.4.0104 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Selasa 14 Maret 2018 bertepatan dengan 14 Rajab 1439 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Maret 2018

26 Rajab 1439

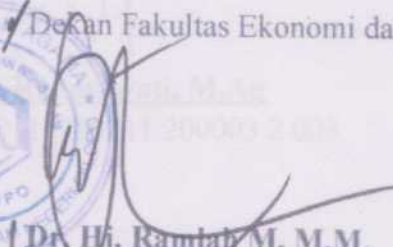
TIM PENGUJI

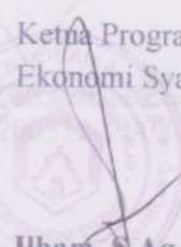
- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Takdir, SH., MH. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001


Ilham, S.Ag., M.A.
NIP 19731011 2003121003

ABSTRAK

Nurmayanti, 2018. “Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kel. Salotellue kec. Wara Timur kota Palopo” skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Ilham, S.Ag., M.A dan Dr. Takdir, M.H.

Kata Kunci : Pemberdayaan, UMKM,

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kel. Salotellue Kec. Wara Timur Kota palopo. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut yaitu : 1. Bagaimana sistem pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo 2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kota Palopo 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kota Palopo

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data dan temuan penelitian dalam bentuk uraian mendalam kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi atau pengamatan langsung, dokumentasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya sistem pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh dinas koperasi dan UMKM kota Palopo kepada para pelaku UMKM di kec. Wara Timur kel. Salutellue tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. UMKM sangat berperan penting bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kota Palopo terkhususnya di Kec. Wara Timur. Adapun upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yaitu dalam hal pendanaan, izin usaha, sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi pelaku UMKM. Dalam melakukan pemberdayaan UMKM tentunya banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaanya yaitu, sumber daya manusia, pembiayaan atau modal dan promosi atau pemasaran produk.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana .shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad saw, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dalam proses penelitian peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak terkhusus kedua orang tua saya ayahanda juddin dan ibunda Nursia yang telah mendukung peneliti dengan cinta kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya sampai saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo. Peneliti juga merasa berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang takterhingga kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, yang senantiasa membina dimana peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, M.H, Dr. Rahmawati, M.Ag, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., selaku wakil dekan I, II, III, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Bapak Ilham, S.Ag., MA selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Ibu Dr. Fasiha, S.El., M.El. selaku sekretaris prodi ekonomi syariah.
4. Bapak Ilham, S.Ag., MA .selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Takdir, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penelitian skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Rahmawati, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku penguji II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. Pimpinan dan pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti menjalani studi.
8. Kepada suami tercinta, Sultan Ibrahim, S.Kom dan anak tercinta Yumna Althafunnisa Ibrahim yang dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengertian, kesabaran serta segala bentuk pengorbanannya secara lahir, batin, moral dan materil yang sangat mendorong peneliti untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi terwujudnya cita-cita peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Semoga gelar ini bias membuat dia bangga.
9. Kepada kedua orang tua Ibu Nursia dan Bapak (alm. Juddin) yang selama ini telah banyak mendukung dalam segala hal,
10. Kepada Kadis dan seluruh staf dan pegawai kantor dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data, informasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .

11. Kepada teman-teman FEBI Khususnya Ekis C Angkatan 2014 yang telah banyak memberikan masukan dan inspirasi kepada peneliti selama ini. Semoga perjuangan ini bias berlanjut kejenjang yang lebih tinggi lagi. Juga kepada teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Peneliti berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini berguna bagi yang memerlukannya.

Palopo, Maret 2018

Peneliti

Nurmayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING 1.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING 2.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
BAB II TinjauanPustaka.....	11
A. PenelitianTerdahulu yang Relevan	11
B. Tinjauan Pustaka	14
C. Kerangka Pikir	32
BAB III Metode Penelitian.....	34
A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	35
C. Subjek dan objek penelitian	35
D. Teknik dan instrumen pengumpulan data	36
E. Teknik pengolahan analisis data	40
BAB IV Penelitian dan Pembahasan.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42

B. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
Daftar Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup Peneliti	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak terjadinya krisis ekonomi, sektor UMKM seperti naik daun kemampuan sektor ini menahan goncangan krisis dibandingkan perUsahaan-perUsahaan besar, membuat ada keyakinan bahwa masa depan perekonomian indonesia berada disektor ini. Usaha mengembangkan UMKM juga bukan merupakan barang baru. Sejak dulu upaya ini telah ada, di zaman orde baru, upaya pengembangan UMKM dikaitkan dengan upaya pemerataan. Dulu ada program KUK, KIK maupun orang tua asuh yang dimaksud untuk meningkatkan keberadaan UMKM. Selama masa reformasi pun UMKM meningkatkan perhatian serius, Pemerintah BJ Habibie berani mengeluarkan dana hingga Rp20 triliun atau sebanding dengan 10% dana APBD dalam upaya pengembangan UMKM. Penelitiannya pelaksanaan program terdahulu kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM.¹

UMKM mempunyai peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Memberdayakan UMKM diyakini dapat mencapai pemulihan ekonomi. UMKM sendiri pada dasarnya sebagian bersifat informal dan arena itu cenderung lebih mudah untuk dimasuki oleh beberapa pelaku Usaha yang baru.

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi UMKM tidak hanya pada penyelidikan lapangan pekerjaan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto (PBD). Kenyataan dilapangan (data empiris), banyak pelaku UMKM yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan Usaha dalam

¹Supriyanto'' *Pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan*'' , jurnal Ekonomi & Pendidikan, volume 3 nomor 1, April 2006

menghadapi konjungtur perekonomian serta berbagai ketidakpastian dalam pasar input maupun output.

Adapun masalah pemberdayaan UMKM yang terjadi di Kota Palopo yang telah disurvei oleh Bank Indonesia(BI) Provinsi sul-sel ialah:

1. Kurangnya bantuan modal dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga lainnya.
2. Sumber daya manusia(SDM) yang dimiliki. “ skill yng dimiliki pelaku Usaha itu sangat minim, sehingga meraka tidak kreatif dalam mengembangkan Usahanya.
3. Lemahnya pengembangan jaringan dalam pemasaran produk mereka terbatas akses pasar, dikarenakan mereka tidak memiliki cukup ilmu untuk mengetahui pemasaran.

Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansia (organisasi manajemen). masalah finansial diantaranya adalah

1. Kurangnya kesatuan (terjadinya mismath) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
3. Biaya transaksi yang tinggi,yang disebabkan oleh prosedur kredit yang dikucurkan kecil.
4. Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
6. Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manejerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (nonfinansial) diantaranya adalah:

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan dibidang kewiraUsahaan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasan sumber daya manusai (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.²

Maka dari itu, pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusai dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sentro ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia³

UMKM juga dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia karena Usaha kecil menengah merupakan unit yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan Usaha produktif, maupun dalam

²Idris Yanto Niode "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan", jurnal kajian ekonomi dan bisnis OIKOS-NOMOS. Volume 2,nomor 1/ Januari 2009.ISSN 1979-1607, LPPEB FIS-UNG

³ Sudaryanto,Ragimun, dan rahmarina wijayanti", *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas asean*"

hal penyerapan tenaga kerja. Sehingga UMKM dapat menekan angka pengangguran, menyediakan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun karakter bangsa.⁴

Oleh sebab itu untuk memperlancar Usahanya, diharapkan banyaknya kontribusi dari pemerintah terhadap perkembangan Usaha mereka. Kontribusi seperti dengan hadirnya:

1. Lembaga keuangan sebagai pembantu dana.
2. Pelatihan sumber daya, mengingat para pelaku Usaha masih tradisional sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif. Namun hal ini juga sedah mulai teratasi dengan adanya support dari pemerintah dengan pelatihan-pelatihan untuk UMKMserta bantuan mesin-mesin produksi, sehingga proses pelatihan dan pembinaan para pelaku UMKM mampu meningkatkan Usahanya.⁵
3. Pemasaran produk, produk UMKM yang rata-rata masih dipasarkan hanya daerah sekitar, padahal kualitas produk sudah mampu untuk menjangkau ke Negara lain untuk di export, maka dari itu melalui UMKM plasa yang membantu memasarkan produk UMKM Indonesia melalui Market Place yang dibangun. Disamping itu Market Place juga mempromosikan melalui sosial media, digital advertising, portal berita, serta media online lainnya.

Adapun Keadaan UMKM di Kota Palopo bisa dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di kota Palopo dengan jumlah mencapai 6.587 UMKM di tahun 2017, dimana jumlah Usaha Mikro di kec. Wara Timur sebanyak 470 Pelaku Usaha Mikro yang

⁴Tarangana Gani Putra, “Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku Usaha dalam pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang”, Kebijakan dan Manajemen Publik, 3, 1 (Januari-April 2015), 1.

⁵ Alhempy, Raden Rudi dan Wismar Harianto, ” Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan”, Media Riset Bisnis dan Manajemen, vol. 1. nomor 1, April 2013.

menggunakan modal sekitar 3.346.795.900 dan Usaha kecil sebanyak 224 pelaku yang menggunakan modal sekitar 40.214.00 dan Usaha menengah sebanyak 5 pelaku dengan modal 8.225.000 dari data yang ada di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM kota Palopo. Hal ini menunjukkan peningkatan dari banyaknya pelaku UMKM dari tahun sebelumnya.

Akan tetapi dari hasil survey dan pengamatan yang peneliti lakukan di kota Palopo Kec. Wara Timur, tidak semua pelaku UMKM mengalami peningkatan. Ada beberapa pelaku UMKM yang usahanya tidak berkembang dikarenakan kurangnya modal, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki kurang baik dalam pemasaran produk maupun pembuatan produk, ini merupakan salah satu tugas pemerintah dalam memberi modal, membina dan memfasilitasi. Tetapi tidak sedikit pula pelaku UMKM yang mengalami peningkatan dimana adanya modal baik itu milik pribadi maupun bantuan dari pemerintah serta mempunyai skill dalam pemasaran dan produksi. Banyaknya pelaku UMKM yang merintis sebuah Usaha seperti Usaha jual campuran, perbengkelan, percetakan, konveksi, dll. Hal ini menunjukkan banyaknya peluang Usaha kerja baik itu bagi Usaha pemula maupun pengusaha-pengusaha yang membutuhkan karyawan. Allah swt. berfirman dalam Q.S At Taubah (9) :105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁶

Islam telah memberikan rambu-rambu yang jelas di dalam-Nya, Muslim boleh kaya, bahkan wajib kaya, namun kekayaan tersebut tidak membuat lupa kepada dzat yang memberikan kekayaan, ialah Allah SWT. Orang islam y

. kepada dzat yang memberikan kekayaan, ialah Allah SWT. Orang islam yang kaya haruslah pandai bersyukur atas limpahan anugrah-Nya.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. Bersabda

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك عن أبي هريرة)

Artinya :

Hendaklah seseorang di antara kalian pergi pagi-pagi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya kemudian (menjualnya) lalu bersedekah dengannya serta tidak butuh pada pemberian orang lain lebih baik baginya daripada meminta kepada orang lain diberi maupun tidak karena sesungguhnya tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi tanganmu “ (Hadis Nabidari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, Malik)⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang diperoleh dari bekerja, yaitu : pertama, secara ekonomi, orang yang bekerja dan berwiraUsaha dapat mempunyai kekayaan sehingga tidak menjadi orang miskin, tetapi orang kaya secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta-minta kepada orang

⁶Departemen Agama RI al-Quran Dan Terjemahnya Special For Women, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran Revisi Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, h.203.

⁷ Muhammad bin ‘isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi al-jami’ al-Shahi h, Juz 3, (Beirut : Daral-Fikr,t.th), h. 55.

lain, kedua secara social, orang yang mampu (kaya) karena bekerja atau berwiraUsaha kemudian perduli terhadap orang lain dengan memberikan sebagian rezekinya, akan mendapatkan posisi yang terhormat di mata masyarakat sebagai orang yang dermawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yakni,

1. Bagaimana sistem pemberdayaaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo?
2. Bagaimana Hambatan dan solusi yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan UMKM di kec. Wara Timur kota Palopo?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberdayaaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo
2. Untuk mengetahui Hambatan dan solusi yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan UMKM di kec. Wara Timur kota Palopo
3. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kota Palopo?.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah Sebagai bahan referensi untuk untuk mengembangkan UMKM, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah Bagi pemerintah dengan penelitian ini diharapkan dapat lebih serius memperhatikan betapa besar peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat di kec. Wara Timur kota Palopo sehingga pemerintah bisa lebih memperhatikan pelaku UMKM dalam mengembangkan Usahanya utamanya dalam hal memperbaiki sistem pemberdayaan UMKM bagi masyarakat.

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Defenisi operasional variable adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.⁸

Untuk menghindari keragu- raguan dalam penafsiran yang berbeda maka perlu penegasan istilah pada judul skripsi tersebut sebagai berikut;

Upaya pemerintah ialah suatu Usaha kegiatan atau sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ialah suatu proses kepada masyarakat setempat agar menjadi berdaya, mendorong, maju dan memotivasi agar mampu memiliki kemampuan atau keahlian untuk menentukan dan meneruskan hidupnya.

Adapun UMKM yang dimaksud disini adalah orang yang melakukan sebuah Usaha baik itu berupa jasa maupun produk yang mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah.

⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) h. 152.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah untuk menggambarkan tentang posisi penelitian ini dengan penelitian sejenisnya yang telah ditulis oleh kalangan akademisi. Ini dilakukan guna menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penelitian yang pernah ada. Setelah melakukan telaah dari beberapa karya tulis, terdapat beberapa karya tulis penelitian yang mendukung dalam penelitian skripsi ini yang relevan dengan judul jurnal yang peneliti angkat yakni,

1. Skripsi Sri wahyuni, *Strategi pemberdayaan Usaha kecil dan menengah Di Dinas Koperasi, penindustrian dan perdagangan kabupaten Sidrap*, skripsi ini membahas dari fase partisipatoris dari segi pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Strategi dari Dinas Koperasi, UMKM perindustrian dan perdagangan adalah dibina, digabung dan dibubarkan. Pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan dapat menggunakannya dalam koperasi, pelatihan yang dilakukan selama 2012 ini sebanyak 11 kali pelatihan itupun tidak dikhususkan untuk koperasi pertanian saja, akan tetapi koperasi secara umum.⁹
2. Skripsi Jaka Sriyana dengan judul, *strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) studi kasus: (Di Kabupaten Bantul*, dengan hasil penelitiannya yaitu dari fase partisipatoris, yang merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Pada tahap ini, proses pemberdayaan pada

⁹Sri wahyuni R” *Strategi memberdayakan usaha kecil, menengah di dinas koperasi, penindustrian, dan perdagangan kabupaten sidrap*”.(skripsi angkatan 25/02/2013

dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin berkurang dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian pelatihan.¹⁰

3. Skripsi Robby firmansyah dengan judul, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Pperdagangan dan Parwisata Kabupaten Madiun dan Sentra industri Brem desa kalibu kec. Mejayan kabupaten madiun)*. Adapun hasil penelitiannya, pertama yaitu salah satu peran penting pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di sentra industri brem adalah pengembangan pemasaran diskoprindag dalam memberikan bantuan promosi dengan cara mengikut sertakan hasil-hasil produksi Brem dalam suatu pameran, kedua, pengembangan sumber daya manusia. ketiga, memperoleh perizinan.

Perlu dijelaskan bahwa perbedaan penelitian dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil yang dilakukan oleh saudara Skripsi Sri wahyuni ,Jaka sriyana, dan Robby firmansyah yaitu:

Pertama pada tahun pelaksanaan penelitiannya, Sri wahyuni melaksanakan penelitiannya pada tahun 2013, Jaka sriyana melakukan penelitiannya pada tahun 2010, dan Robby firmansyah melaksanakan penelitiannya pada tahun 2004, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dilakukan pada tahun 2018.

Kedua, tempat pelaksanaan penelitiannya, Sri Wahyuni melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Sidrap, Jaka Sriyana melakukan penelitiannya di Kabupaten bantul dan Robby Firmansyah melakukan penelitiannya di desa kalibu kec. Mejayan kabupaten madiun, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di kota Palopo.

¹⁰Jaka sriyana”*Strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM) studi kasus: Kabupaten Bantul*”,Skripsi 2010

Ketiga, rumusan masalah yang diteliti berbeda, Sri Wahyuni dengan fokus Strategi pemberdayaan Usaha kecil dan menengah Di dinas koperasi, penindustrian dan perdagangan Kabupaten Sidrap. Jaka Sriyana dengan fokus Strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) studi kasus: Kabupaten Bantul dan Robby Firmansyah dengan fokus Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (studi pada Dinas Koperasi,perindustrian,perdagangan dan pariwisata kabupaten Madiun dan Sentra industry Brem). Sementara fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo Kec.Wara Timur peneliti mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan kajian di atas judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun dalam bentuk skripsi dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, disamping dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya juga diharapkan menjadi catatan baru dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan UMKM

a. Defenisi Pemberdayaan

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan.

Adapun dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi :

1. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana secara bersama-sama.
2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan memberikan jalan ke sumber penghasilan.
3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi.
4. Kompetensi di peroleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup.
5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah dan evolusioner yang selalu memilikibanyak solusi.
7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dan perseorangan an perkembangan masyarakat.¹¹

Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara.

Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki yaitu dengan transfer daya dari lingkungannya.¹²

¹¹Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen pemberdayaan sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017). h.116.

¹²Priyono, Onny dan Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta. Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).1996).hl. 2.

Menurut Wuradji mengatakan bahwa :

pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.¹³

Pemberdayaan menurut Pranakan dan Pranayo,

Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.¹⁴

Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu:

1. Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.¹⁵

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu:

¹³Wuradji dalam Aziz Muslim.*Metodologi Pengembangan masyarakat*, (Yogyakarta : Teras. 2009) h.3.

¹⁴Onny ,Priyono, dan Pranaka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta : Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS),1996.), h. 2.

¹⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung. Humaniora Utama Press.2001).h. 89.

1. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.
2. kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana kegiatan.

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya.
3. Melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.¹⁶

¹⁶Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), h.103.

Adapun pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu:

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹⁷

Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi merumuskan strategi pemberdayaan melalui :

1. Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan Sistem Ekonomi Pancasila.
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar.
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju) dalam hal

¹⁷Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung. Refika Aditama. 2010),h. 67-68.

permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).¹⁸

Sedangkan Pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya berkualitas.

b. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Adapun tujuan pemberdayaan UMKM yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

¹⁸Faried Ali, dkk, *Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, (Bandung. Refika Aditama. 2012).h, 115.

c. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbaris potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian secara terpadu¹⁹

Adapun peran Pemerintah melalui program pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Pemerintah sebagai regulator, pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut yaitu:

1. Kredit usaha rakyat (KUR),
2. Kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.

¹⁹Tambunan, Tulus TH, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Jakarta LP3ES, 2012).

3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik,
4. petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani(Gapoktan).
5. Kredut Usaha Pembibitan Sapi(KUPS)
6. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM).²⁰

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

Salah satu hal yang sangat penting dibicarakan dalam hal pengembangan ekonomi suatu negara yaitu UMKM (usaha mikro, kecil menengah), sejauh mana suatu daerah melakukan pemberdayaan UMKM agar dapat membuat daerah menjadi maju dari segi pendapatan atau penghasilan.

Pengertian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan Negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, di satu Negara berlainan dengan Negara lain. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

²⁰Sudaryanto, Ragimun, dan Rahmarina Wijayanti, *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN*, h. 21.

²¹Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13

Undang-Undang. Memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50 miliar.²²

Sedangkan pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki

²²Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.²³

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

Tentu saja perbedaan definisi ini membawa konsekuensi tersendiri, diantara adalah :

²³Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKMMenghadapi Pasar Bebas Asean* (jurnal) h. 6.

²⁴Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta, Erlangga : 2010) h. 185.

1. Akurasi identifikasi UMKM untuk kepentingan implementasi kebijakan.
2. Meskipun standarisasi definisi UMKM secara internasional sangat sulit untuk dilakukan, setiap usaha komparasi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika perlu, studi kasus atau lapangan harus dilakukan untuk melengkapi kajian data-data statistik makro yang ada.²⁵

b. Ciri- ciri UMKM dan Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia

Adapun ciri-ciri UMKM yaitu:

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dipergunakan dan dimanfaatkan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produk terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor
6. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

Adapun Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, karena hampir keseluruhan populasi usaha nasional adalah usaha berkategori UMKM. Peran penting dari usaha kecil dan mikro di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: peranannya dalam menyerap tenaga kerja dan terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan *home industry* atau industri padat karya yang secara langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia mengingat banyaknya tenaga kerja yang memiliki

²⁵Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra. *Kewirausahaan UKM.*, (Cet. 1; Jakarta : Graha Ilmu, 2007), h.8.

pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas. Melalui UMKM ini, tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan terbatas tersebut dapat terserap.

Peran UMKM teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Jika memang disepakati bersama bahwa tarikan konsumsi, baik konsumsi domestik maupun konsumsi asing (ekspor), merupakan faktor penggerak ekonomi utama dalam 4 tahun terakhir. Terutama, karena kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang sangat terbatas, maka dapat diduga bahwa peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar.²⁶

Secara umum peran UMKM dalam perekonomian nasional menurut Departemen Koperasi dan UMKM, yaitu :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja terbatas.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

UMKM di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Pernyataan ini tentu tidak tanpa alasan, fakta menunjukkan bahwa memang kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar.²⁷

²⁶Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia "Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan"*, (Malang, Bayumedia Publishing : 2005) h.45.

²⁷Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.

UMKM juga tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga penting secara politik dan sosial. Bahkan dia juga dapat berfungsi sebagai wadah guna terciptanya perusahaan-perusahaan skala besar dimasa mendatang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan adanya UMKM dapat juga menjadi wadah pelatihan bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai skill mumpuni sebelum memasuki perusahaan besar yang menuntut mutu tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisonal atau modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang ditamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan, (2) Departemen Koperasi dan UMKM.²⁸

Salah satu peran UMKM dalam perekonomian yang paling krusial adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakter dari peran tersebut sangatlah fleksibel sehingga UMKM dapat direkayasa sedemikian rupa untuk mengganti lingkungan bisnis lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan sifat fleksibel itulah yang kemudian menjadikan keunggulan tersendiri, dengan itu UMKM dapat terus bersaing memenuhi kebutuhan pasar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Peran UMKM lainnya yaitu menyumbang pembangunan ekonomi dengan berbagai jalan, yaitu menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, Menurut data yang bersumber dari BPS (2004, 2006), sebagian besar usaha nasional adalah usaha berkategori UMKM, yaitu sebanyak hamper 45 juta unit pada tahun 2005 atau sekitar 99 persen dari total usaha nasional. Hal ini

²⁸Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Ranchman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*,h. 20.

menunjukkan bahwa dengan banyaknya usaha yang berkategori UMKM, sektor ini dapat dijadikan sebagai wadah penyerapan tenaga kerja.

c. Karakteristik Usaha Kecil Mikro menengah (UMKM)

UMKM berdasarkan konsep UMKM itu sendiri yaitu suatu komite untuk pengembangan ekonomi (*Committee of Economic Development*), mengajukan konsep tentang usaha kecil/ menengah dengan menekankan pada kualitas/mutu dari pada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil-menengah dan besar.

Ada 4 konsep usaha kecil-menengah tersebut, yaitu:

1. Kepemilikan.
2. Operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal.
3. Wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, meskipun pemasarannya dapat melampaui wilayah lokalnya.
4. Ukuran dari perusahaan dalam industri bersangkutan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerja/karyawan atau satuan lainnya yang signifikan.²⁹

Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship, maka UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

²⁹Tiktik Sartika Partomo Dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, h.13.

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.³⁰

Untuk mengetahui tentang bagaimana karakteristik UMKM di Indonesia beberapa ahli mengemukakan beberapa kriteria tentang UMKM. Kriteria umum usaha kecil dan menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Tanpa staf yang berlebihan.
3. Pembagian kerja yang “kendur”
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan.³¹

Adapun karakteristik UMKM yang lain, yaitu:

1. Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum.
2. Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur yang berumur dibawah 25 tahun.
3. Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi.
4. Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.

³⁰Tiktik Sartika Partomo Dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, h.25.

³¹Tiktik Sartika Partomo Dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, h.13.

5. Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.³²

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki ciri-ciri spesifik, seperti yang dikatakan oleh Mintsberg (1992), yaitu, Struktur organisasi yang sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hirarki manajemen yang kecil, sedikit aktivitas yang diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan, jumlah karyawannya sedikit, pengusaha sangat sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan dan sistem akuntansi kurang baik (bahkan biasanya tidak dimiliki).³³

Dari berbagai karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pelaku usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan atau sederhana, menggunakan modal yang tergolong kecil dan berasal dari dana pribadi.

d. Keunggulan dan kelemahan UMKM

Secara umum perusahaan berskala kecil baik perseorangan maupun kerja sama memiliki keunggulan dan daya tarik seperti:

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi).
2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.

³²Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 6-10.

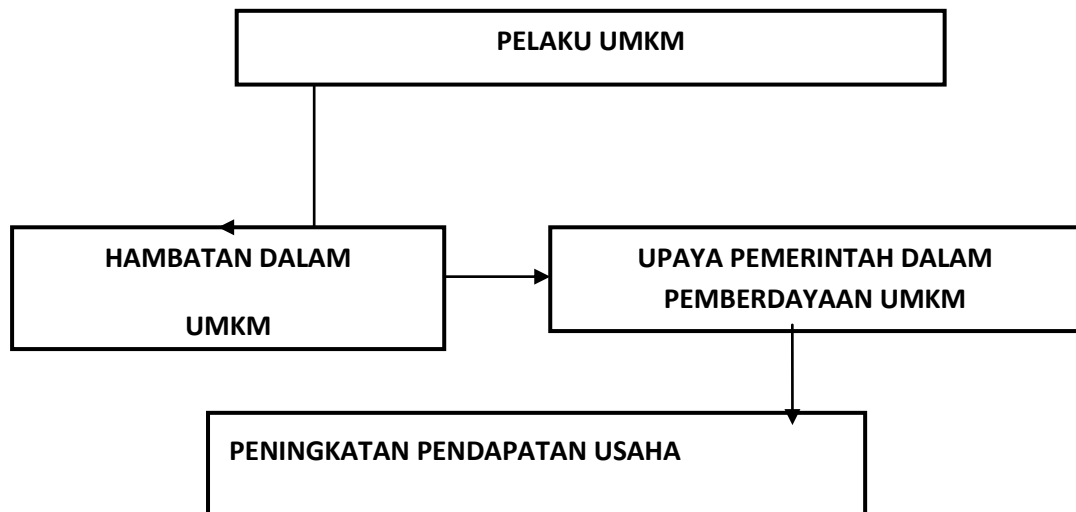
³³Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia "Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan"*.h.41.

3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa- jasa baru.
4. Usaha kecil di Indonesia, resiko usaha menjadi beban pemilik.
5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur .
6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
7. Independen dalam penentuan harga produksi atas barang dan jasa-jasanya
8. Prosedur hukumnya sederhana
9. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/ pengusaha buka perusahaanya.
- 10.Kontak- kontak dengan pihak luar bersifat pribadi, mudah dalam proses pendiriannya
- 11.Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki, pemilik modal secara mandiri dan bebas waktu.
- 12.Pemilik menerima seluruh laba, umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk disurvei.
- 13.Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan, yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
- 14.Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya.
- 15.Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.
- 16.Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.

C. Kerangka Fikir

Kerangka fikir merupakan serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terikat.

Kerangka fikir sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat atau bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Dari alur kerangka pikir di atas dapat kita lihat bahwa ketika pelaku UMKM di Kota Palopo ingin memulai atau mengembangkan suatu usaha pastinya mengalami suatu hambatan seperti kurangnya modal baik itu berupa dana maupun fasilitas, dan adapun upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo seperti adanya pemberian bantuan pendanaan, memfasilitasi sebuah usaha, serta memberikan pelatihan dan pembinaan dalam mengembangkan sebuah usaha. Sehingga peningkatan pendapatan suatu usaha meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

D. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut sebagai *naturalistic method*. Melakukan penelitian dengan jenis kualitatif, harus berbekal teori dan wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti sehingga mampu menjadi *human instrument* yang baik.³⁴

Metode ini disebut juga metode artistic, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode ethnography, karena pada antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁵

Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.³⁶ Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan di Kec. Wara Timur Kota Palopo.

³⁴Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII;Bandung: Alfabeta, 2011), h. 213.

³⁵ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*,h.213.

³⁶Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h.22.

E. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Koperasi dan UKM yang beralamat di Jl. Andi Djemma No. 68 Kelurahan Ammasangan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah kelurahan Salutellue Kec. Wara Timur Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo.

F. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang akan diwancarai adalah bapak Karno, S.E, Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM, ibu Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, dan UKM Palopo dan Amrul Halim, Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan untuk mengetahui profil dan informasi-informasi penting lainnya dan beberapa para pelaku UMKM Di Kec. Wara Timur kota Palopo yaitu: Hasni Amir A.md (Toko Roti D'Find), Arbeanyh (Salon), Hasri Hamza (Usaha Kayu) Herlina djupri, S.sos (chocsuji/ makanan), Sarifa Daud (perabotan pengantin), Muh. Kaharuddin (KUB. Cahaya laut/ Perikanan), Yuliana Baso (Konveksi usaha baru), Baharuddin (perbengkelan), Raodah (Kios), Faisal Sofyan (Percetakan), Hamdani Husain (Pedagang Kue), Nursia (Pedagang kue),

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷ Data primer juga disebut juga sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung, dimana teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.308.

dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dinas Koperasi dan UKM Palopo dan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan untuk mengetahui profil dan informasi-informasi penting lainnya

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh literatur dokumen dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk mengambil data tentang pemberdayaan UMKM di kota Palopo.

G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian agar dapat mengumpulkan data-data yang dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan besaran atau persentase hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

1. Metode Library research yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku yang ada kaitanya dengan pemahasan masalah.
2. Metode field research yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian). Adapun metode yang digunakan adalah : wawancara, catatan observasi dan dokumen. Instrumen tersebut digunakan karena pertimbangan praktis yang memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel .Berikut uraikan secara sederhana, bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian:
 - a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan mengadakan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan, menggunakan wawancara terstruktur

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.137.

dan wawancara tidak terstruktur.³⁹ Oleh karena itu, jika teknik tersebut digunakan dalam penelitian maka perlu terlebih dahulu diketahui sasaran, maksud masalah yang dibutuhkan, sebab dalam suatu wawancara dapat diperoleh keterangan yang berkaitan.

- b. Observasi, adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sebagai sasaran.⁴⁰

Pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran, pengecapan. Teknik ini digunakan agar memperoleh data yang lebih akurat dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dan menjadi partisipan di lokasi penelitian.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pengamatan secara langsung dan pengamatan tidak langsung, adapun pengamatan secara langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh observer sedangkan Pengamatan tidak langsung yaitu pengamatan terhadap suatu obyek melalui perantara suatu alat.⁴¹

Partisipasi yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti, keikutsertaan dalam interview.⁴²

³⁹Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Cet.V: Yogyakarta.PT Raja Grafindo,1995).h.82.

⁴⁰Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*.,h.76.

⁴¹Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,(Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 112.

⁴²Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 136.

c. Dokumentasi dan arsip, suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang memberikan sumber informasi yang kaya secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya.⁴³

Dalam pengumpulan data di lapangan, ada beberapa tahap yang perlu dipersiapkan, yaitu tahap persiapan dan tahap penelitian. Pada tahap persiapan terlebih dahulu melengkapi hal-hal yang dibutuhkan lapangan, baik yang menyangkut penyusunan dan pemantauan seperti membuat pedoman wawancara, catatan observasi dan penyusunan angket yang akan diedarkan kepada responden.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan penelitian, mengumpulkan data melalui penelitian di perpustakaan dan melalui lapangan. Agar penelitian lebih terarah maka penelitian ini melewati empat tahapan yaitu :

1. Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah Penelitian

Pada tahap ini penulis membuat desain penelitian, membuat jadwal, serta merumuskan masalah yang menarik untuk diteliti. Melakukan studi pustaka, terutama literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan logis, dan selanjutnya menyusun rencana penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

⁴³Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 110.

Pada tahap ini peneliti berkunjung ke tempat yang akan diteliti untuk melakukan observasi dan interview dengan kepala Dinas Koprasi Dan UMKM Kota Palopo, dan pelaku UMKM kota palopo.

3. Tahap Pengolahan Data

Sebelum peneliti mengolah data-data yang diperoleh, terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang untuk memeriksa kelengkapan data yang perlu disempurnakan sebelum memasuki pembahasan.

4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti mulai menyusun laporan penelitian dengan melakukan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh di lapangan baik yang berupa angka-angka maupun hasil wawancara.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴Dalam penelitian ini teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diawali dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan. Dalam proses reduksi ini, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

⁴⁴Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.244.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendispaly data. Proses mendisplay data, yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir setelah mendisplay data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.⁴⁵

Dari teknik pengolahan data di atas, merupakan suatu analisis yang bersifat kualitatif deskriptif sehingga data yang didapatkan dari lapangan/ lokasi penelitian diolah dengan menggunakan kalimat yang tersusun yang mudah dipahami.

⁴⁵Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, h. 62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Lokasi hasil Penelitian

a. Sejarah singkat Dinas Koperasi dan UMKM Palopo

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo adalah sebuah instansi Pemerintahan yang dahulu dikenal sebagai Dinas Koperasi perdagangan dan perindustrian atau yang akrab disebut dengan DisKoperasi yang kini telah terbagi menjadi tiga instansi yaitu Dinas perdagangan , Dinas perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM. Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo sebagai berikut:

- a. Drs. H. Mashalim, MM, masa jabatan dari tahun 2003 – 2009 kantor beralamat di jalan tandi pau
- b. Djafar Laticonsina pada tahun 2009 – 2010, kantor disKoperasi berpindah alamat ke jalan patang 2 No. 2
- c. H. Syamsurijal Syam, SE., MBA pada tahun 2010-2013.
- d. Karno, S.Sos pada tahun 2013 hingga sekarang DisKoperasi dipimpin oleh pemimpin keempat yakni dimana pada masa jabatannya pada tahun 2014 bulan januari DisKoperasi kembali berpindah alamat di jalan Andi Djemma No. 68 dan masih dimasa jabatan Karno, S.Sos tepatnya pada tahun 2017 bulan januari DisKoperasi terbagi menjadi tiga instansi dimana salah satunya Dinas Koperasi dan UMKM yang masih dipimpin oleh Karno, S.Sos hingga sekarang.⁴⁶

⁴⁶Amru Halim, S.H, Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Setiap pemimpin tentunya menginginkan kemajuan bagi instansi yang dipimpinnya, dan untuk memajukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo maka diperlukan visi dan misi guna menunjang keberhasilan instansi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki daya saing dan mandiri.

b. Misi

- 1) Mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Meningkatkan daya saing Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁴⁷

c. Letak Geografis Dinas Koperasi dan UMKM Palopo

Kota Palopo dilihat secara geografis, merupakan daerah yang kaya dengan segala potensinya memiliki arti yang sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, social maupun budaya, bahkan dengan spontanitas masyarakatnya dan kesetiakawanan yang tinggi secara kompotitif mudah digerakkan untuk kepentingan pembangunan, apalagi yang menyentuh kepentingan rakyat langsung dan bersifat monumental.

Untuk mengetahui tentang letak geografis Dinas Koperasi dan UMKM Palopo peneliti mencoba menguraikannya walaupun tidak mendetail tetapi secara garis besar saja dan masih banyak kekurangan dalam pengetahuan masalah Dinas Koperasi dan UMKM Palopo. Kantor Dinas Koperasi dan UMKM terletak di jalan Andi Jemma No. 68

⁴⁷Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo tanggal 14 Januari 2018.

Kelurahan Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo Provinsi Sul-Sel di atas tanah seluas $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2$ dan $\pm 10 - 20 \text{ m}$ dari permukaan laut dengan batas- batas sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor badan pertanahan
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan kantor pajak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kantor badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kota Palopo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kantor WaliKota

Keberadaan letak geografis kantor Dinas Koperasi dan UMKM yang sangat strategis yang sangat mudah dijangkau karena berada di tengah-tengah pusat Kota Palopo.⁴⁸

- d. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM dan Pembagian Tugas
 - a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo mempunyai tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan dan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kota Palopo.
2. Menyelenggarakan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kota Palopo.
3. Memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kota Palopo.
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kota Palopo.
5. Menyelenggarakan perizinan usaha perdagangan di wilayah Kota Palopo.

⁴⁸Amru Halim, S.H, Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

Menyelenggarakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kota Palopo. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo mempunyai fungsi yakni menyelenggarakan pelayanan umum di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan.

b. Sekretariat

Sekretariat di lingkup Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub bagian Keuangan. Tugas dan fungsi bagian Sekretariat meliputi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan. Tugas dan fungsi yang dimaksud seperti merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Pada Sub bagian Umum dan kepegawaian akan melaporkan kegiatan Administrasi umum dan kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan akan melaporkan perencanaan dan pelaporan, sedangkan Subbagian Keuangan akan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dikepalai oleh Kepala Bidang dan terdiri atas tiga Sub bidang yakni Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun tugas dari Kepala Bidang Koperasi dan UMKM terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM adalah sebagai berikut.

1) Tugas Kepala Bidang

- a. Merumuskan bahan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
- b. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum Koperasi.
- c. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada Koperasi dan usaha kecil menengah antara lain bidang usaha, pengadaan barang dan jasa serta pemborongan barang Pemerintah.
- d. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan Koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain Bank, Koperasi, lembaga keuangan non bank dan lembaga alternatif lainnya.
- e. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.
- f. Merumukan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Koperasi dan UMKM.

2) Tugas Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan pengelompokkan pengusaha kecil dan menengah.
- b. Menyiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha usaha pertanian dan non pertanian.
- c. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi usaha pertanian dan non pertanian.

3) Tugas Seksi Bina Usaha Koperasi

- a. Melaksanakan program dan rencana kerja pembinaan dan bimbingan Bina Usaha Koperasi. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan permodalan pada pengusaha pada Bina Usaha Koperasi.
- b. Melaksanakan pemeliharaan mutu hasil produksi yang dihasilkan.
- c. Melaksanakan upaya promosi hasil produksi baik local, provinsi dan nasional.
- d. Tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian ijin usaha perdagangan.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan di daerah dan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha.
- g. Menyiapkan data pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menyiapkan bahan penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar.
- i. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data/informasi serta bahan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa pada seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- j. Melaksanakan monitoring rencana dan program pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta menyusun saran perbaikan atau pemecahan masalah.

B. Sistem Pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo

Pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo kepada para pelaku UMKM di kec. Wara Timur tentunya memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dibuat dalam beberapa program kerja yang terencana yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, maupun badan Pemerintah, yang nantinya akan diaplikasikan di lapangan. Dari hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu ibu Dorkas Batan, S.E, menjelaskan:

“Sebelum melakukan pemberdayaan UMKM kepada masyarakat terlebih dahulu memperoleh data lapangan di sebuah daerah, kemudian memberikan fasilitas ataupun pelatihan.”⁴⁹

Jadi, masyarakat perlu mendapatkan fasilitas dan arahan yang baik sebelum membuka sebuah usaha demi terciptanya usaha yang mampu bersaing dan menghasilkan pendapatan yang diinginkan.

Kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Palopo mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kerja guna meningkatkan pendapatan.

Dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Dukungan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, upaya untuk menumbuhkan iklim usaha juga dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki.

1. Pendanaan

Pendanaan merupakan nadi penting dalam kemajuan sebuah usaha yang berada di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha yang membuat banyak pelaku usaha

⁴⁹ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Dengan adanya keputusan untuk mengadakan investasi suatu jasa atau barang maka diperlukan dana yang dapat membelanjai investasi tersebut.

Pendanaan juga dapat disebut sebagai Investasi dalam dana publik. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pendanaan yang dimaksud yakni:

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Karno, S.Sos menjelaskan bahwa; “Adapun sistem pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan Pemerintah, diantaranya adanya bantuan dana bagi usaha pemula di tahun 2017 dengan dana sekitar Rp.10 juta. Dimana para pelaku UMKM Kota Palopo terlebih dahulu memasukkan pengajuan proposal bantuan usaha serta identitas pelaku UMKM, agar bisa mengikuti seleksi berkas, yang nantinya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana tersebut”.⁵¹

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵¹ Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM, *Wawancara*, Ruang kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Tanggal 24 Januari 2018

Tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi dan UMKM, juga memprogramkan bantuan Sertifikat tanah (SHAMAT) gratis kepada 200 pelaku UMKM, dimana pendaftaran di buka pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 februari 2018 hingga kemarin yang mendaftar mencapai 100 UMKM. Adapun syarat untuk mendapatkan SHAMAT gratis yakni pelaku UMKM yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari Kelurahan, tanah yang akan disertifikatkan tidak memiliki sertifikat induk, dan tidak dalam sengketa, bukan PNS, Fc KTP, dan kartu keluarga (KK) yang telah di legalisir, Fc. PBB, dan alas hak seperti kuitansi pembelian, akte jual beli, dan surat warisan atau penyerahan hak. Program bantuan sertifikat gratis bagi UMKM sudah berjalan pada tahun 2014, maksud dari bantuan sertifikat gratis ini sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang mengalami kendala mendapatkan kredit usaha lantaran tidak memiliki anggunan. Dengan adanya sertifikat ini maka UMKM bisa mengakses pembiayaan usaha kepada lembaga keuangan seperti perbankan.

C. Hambatan dan Solusi dalam Melakukan Pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kel. Salotellue Kota Palopo

UMKM ialah usaha yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat Kota Palopo. Dalam melakukan pemberdayaan UMKM tentunya banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yaitu, sumber daya manusia, pembiayaan atau modal dan promosi atau pemasaran produk.

Dalam hal sumber daya manusia, merupakan salah satu kendala serius bagi banyak umkm, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perancang teknik, pengendalian dan pengawasan mutu (quality contro), organisasi bisnis, akuntansi, pengolahan data, penelitian, dan teknik pemasaran.

Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru. Dari hasil wawancara dengan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan. Yaitu Bapak Amrul Halim, SH. menjelaskan:

“Adapun hambatan yang dialami, banyaknya pelaku UMKM yang tidak bersedia untuk didata, kemudian banyaknya pelaku UMKM yang produksinya sudah bagus tetapi kelemahannya dalam ilmu pemasaranNya kurang sedikit mengetahui sehingga usahanya tidak berkembang,”⁵²

Untuk meminimalisir hambatan tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan pokok melalui program-program kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo, seperti melakukan peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai suatu usaha, mendapatkan perlindungan usaha maupun tempat usaha serta penyelenggaraan pelatihan budaya usaha.

Adapun hambatan yang kedua dalam melakukan pemberdayaan UMKM yaitu dalam hal pembiayaan atau modal. Para pelaku UMKM terkadang sulit merintis usaha disebabkan kurangnya modal atau membutuhkan modal yang cukup besar sementara mereka para pelaku UMKM tidak memiliki modal cadangan serta anggunan untuk bisa menjadi jaminan dalam mengambil dana kredit, saat bahan pokok yang digunakan harganya di pasaran tiba-tiba naik dan menyebabkan usaha yang dirintis mulai menurun. Sehingga solusi bagi para UMKM yang memiliki hambatan dalam hal pembiayaan yaitu dengan bantuan pinjaman modal baik dari lembaga swasta maupun Pemerintah.seperti pinjaman modal dari bank dan Koperasi. Dari hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu ibu Dorkas Batan,S.E, menjelaskan:

“Adapun lembaga yang mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM yaitu bank, Koperasi dan beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah.”⁵³

⁵² Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

⁵³ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kec. Wara Timur melalui UMKM yang dirintis tentunya memerlukan bantuan dalam hal pembiayaan. Pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan UMKM dengan bekerjasama dengan bank baik negeri maupun swasta, dalam mencari jalan keluar ketika biaya bahan pokok meningkat. Sehubungan dengan amanat undang-undang, Pemerintah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia dan tentunya di Kota Palopo. Program tersebut antara lain program gerakan kewirausahaan Nasional (GKN) dan pemberian kredit usaha rakyat (KUR), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi para wirausaha.

Kemajuan pendapatan masyarakat dapat diperoleh dari penghasilan para usaha kecil, mikro dan menengah, namun hal tersebut dapat tercapai jika mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dukungan dari dalam pelaku UMKM itu sendiri, lembaga swasta, Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal fasilitas kegiatan dan tentunya dukungan dari Pemerintah setempat. Dari hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu ibu Dorkas Batan, S.E, menjelaskan:

”yang bertanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Palopo, tidaklah bisa ditentukan dalam sepihak sebab harus melibatkan diri sendiri sebagai pelaku UMKM (masyarakat) dan tentunya Pemerintah.”⁵⁴

Hambatan selanjutnya yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan UMKM yaitu promosi atau pemasaran produk yang dihasilkan. Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan pemasaran yang rendah, ditambah produk yang dihasilkan terkadang jumlahnya rendah atau terbatas. Sehingga diperlukan pengembangan kemitraan yang saling membantu antar UMKM guna mempercepat proses kemitraan dalam upaya

⁵⁴ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

mempromosikan produk-produk di pasaran serta diadakannya pelatihan khusus agar lebih terampil untuk mengelola usahanya khususnya dalam hal pemasaran produk.

Salah satu kelemahan usaha kecil yaitu tidak menerapkan sistem pencatatan keuangan atau lebih dikenal dengan sistem akuntansi, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pemasukan. Sehingga dalam pemberdayaan UMKM diperlukan sistem akuntansi yang baik guna meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah setempat. Dalam pemberdayaan UMKM dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk dapat menciptakan UMKM yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Agar dapat berjalan selaras, maka pelaku UMKM juga harus bisa merubah mindset dan memiliki arah terhadap pentingnya praktek akuntansi. Dengan demikian maka usaha tersebut akan menjadi usaha yang maju.

D. Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kota Palopo

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan demikian dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai konsekuensi diundangkannya peraturan ini, Pemerintah harus terus berupaya untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan bantuan baik berupa permodalan, pemasaran, pelatihan dan pendidikan. Hal ini tidak terlepas dengan campur tangan Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi di daerah.

Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan tugas sesuai Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijabarkan melalui tugas fungsi berdasarkan Peraturan Kota Palopo Nomor 40 Tahun 2008 tentang peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipandang cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo. UMKM berbasis pangan lokal banyak ditemukan di Kec. Wara

Timur Kota Palopo yang merupakan salah satu dari pokok perekonomian dalam memperoleh pendapatan yang lebih bagi masyarakat setempat.

Dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Dukungan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, upaya untuk menumbuhkan iklim usaha juga dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki.

1. Pendanaan

Pendanaan merupakan nadi penting dalam kemajuan sebuah usaha yang berada di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha yang membuat banyak pelaku usaha akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Dengan adanya keputusan untuk mengadakan investasi suatu jasa atau barang maka diperlukan dana yang dapat membelanjai investasi tersebut.

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Bapak karno, S.Sos. menjelaskan:

“Adapun peran Pemerintah secara umum dalam upaya pemberdayaan UMKM ialah dalam hal pendanaan, adanya bantuan penyaluran dana kredit (KUR), memfasilitasi baik itu berupa dana maupun peralatan, menciptakan kewirausahaan baru dari kelurahan salah satunya seperti pembentukan program Koperasi, gubernur sayang mart yang baru-baru ini dibentuk oleh gubernur sulawesi-selatan syahrul yasim limpo. Dalam upayanya mendorong Koperasi dan UMKM untuk bisa berjalan dan berkembang, saluran bantuan dari perusahaan-perusahaan besar salah satunya PT. Tonasa yang setiap tahunnya menyalurkan bantuan dana kepada pelaku UMKM. Serta kantor Koperasi dan UMKM Kota Palopo pada tahun 2017 baru-baru ini membentuk sebuah kelompok usaha sebanyak 66 kelompok usaha seKota Palopo. Hal ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat”⁵⁵

⁵⁵Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM, *Wawancara*, Ruang kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 24 Januari 2018.

Dari hasil wawancara dengan bapak Muh.Kaharuddin menjelaskan bahwa:
” adanya bantuan dari Pemerintah berupa penyaluran dana KUR, dan usaha yang dijalankan juga meminta bantuan dari lembaga swasta yaitu Koperasi simpan pinjam untuk mendapatkan dana.”⁵⁶

UMKM dijadikan sebagai agenda yang utama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga perlu diadakannya upaya dalam meningkatkan UMKM yang ada di Kota Palopo dengan cara mengoptimalkan segala potensi-potensi ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa jumlah penduduk masyarakat di Kota Palopo cukup banyak, banyaknya lulusan dari berbagai kampus di Kota Palopo dan masyarakat luar Kota yang mengadu nasib di Kota Palopo, sementara lapangan pekerjaan yang tidak memadai menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan. Masyarakat ekonomi ke bawah tentunya mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, banyak diantara masyarakat yang gengsi dalam bekerja dan hanya mau bekerja dalam kantor atau ruang tertutup yang mempunyai penghasilan tetap. Namun ada yang berpendapat lain, berusaha memperoleh pekerjaan dengan cara yang mandiri dengan membuat usaha mikro,kecil maupun menengah sehingga disebut wiraswasta. Sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo bekerja sama dengan lembaga swasta maupun Pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo. Hal tersebut tentunya mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat setempat. Dari hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu ibu Dorkas Batan,S.E, menjelaskan:

“masyarakat sangat merespon dengan baik adanya pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang bekerja sama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.”⁵⁷

⁵⁶ Muh.Kaharuddin, Anggota Kube Cahaya Laut, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁵⁷ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

UMKM yang tersebar luas di Kota Palopo, khususnya di Kec. Wara Timur dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkembangnya UMKM yang dirintis oleh suatu perusahaan atau milik perseorangan tentu meningkatkan penghasilan yang diperoleh oleh para wiraswasta, terlebih jika usaha tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan ibu Hasni Amir, A.md menjelaskan bahwa:

”dengan adanya pemberdayaan UMKM tersebut memberikan manfaat bagi diri sendiri dan tentunya orang lain, saling berbagi rezeki dan sama-sama saling menguntungkan satu sama lain.”⁵⁸

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah:
 - a. untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan.
 - b. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

⁵⁸ Hasni Amir, A.Md, pemilik usaha D’Find, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

Dari hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu ibu Dorkas Batan,S.E, menjelaskan:

“Pemerintah Kota Palopo terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya beberapa fasilitas penunjang berupa stand dan kios-kios di pasar yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM di Pemerintah Kota Palopo”.⁵⁹

Adapun sarana atau prasarana yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo yaitu dengan mengadakan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar lebih semangat dalam menjalankan usahanya.⁶⁰

Hal yang sama juga dipaparkan oleh ibu Hasni pernah mengikuti pelatihan cara mengembangkan,memasarkan usaha yang dikelolah.⁶¹

Dari hasil wawancara dengan ibu arbeanhy menjelaskan bahwa salah satu upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yaitu mengadakan pelatihan dan pernah mengikuti pelatihan tersebut.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di atas, dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kota Palopo dalam mendukung aspek sarana dan prasarana mampu memberikan yang terbaik untuk para pelaku UMKM di Kota Palopo.

3. Informasi Usaha

⁵⁹ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

⁶⁰ Dorkas Batan, S.E, ketua bidang pemberdayaan usaha kecil menengah, *Wawancara*, Ruang Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 14 Januari 2018.

⁶¹ Hasni Amir, A.Md, pemilik usaha D'Find, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁶² Arbeanhyh, pemilik salon Arbeanhyh, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Pentingnya informasi dalam peluang usaha dapat memberi informasi peluang usaha melalui berbagai media, mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan peluang usaha, menggali peluang usaha, menyusun konsep usaha dan menciptakan nilai tambah yang menguntungkan.

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditujukan yaitu :

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank a dan jaringan informasi bisnis.
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu.
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo menjelaskan:

“Informasi usaha merupakan salah satu program Dinas Koperasidan UMKM dalam pemberdayaan UMKM. Memberi kan informasi-informasi yang berkaitan dalam pengembangan, pemasaran, promosi kepada pelaku UMKM, contohnya jika ada kegiatan pameran yang diadakan di Kota Palopo, maka Dinas Koperasidan UMKM memberikan informasi, seperti ketika kegiatan MTQ atau kegiatan lainnya, para pelaku UMKM dapat meluangkan waktunya untuk mencari rupiah di kegiatan tersebut.”⁶³

Dari penjelasan tersebut diatas terlihat bahwa upaya Pemerintah lebih ditekankan pada penyebaran informasi pasar kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM diinformasikan jika ada kegiatan pameran yang memungkinkan menjadi

⁶³Karno, S.E, Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM, *Wawancara*, Ruang kepalaDinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Tanggal 24 Januari 2018.

sarana promosi dan penjualan produk UMKM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyebaran informasi mengenai kegiatan pameran ternyata belum berjalan efektif karena belum dapat menjangkau semua UMKM, disebabkan karena tidak lengkapnya data mengenai UMKM khususnya pada nomor kontak/ nomor telepon masing-masing pelaku UMKM.

4. Izin Usaha

Izin Usaha adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶⁴

Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi Pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau

⁶⁴Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),h. 32.

sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi Pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan aspek yang meliputi dukungan dalam perizinan usaha seperti :

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan ibu Herlina Djuhfri. S.Sos selaku pelaku UMKM pemilik Choucsuji X Unclekin telah memiliki izin usaha dalam mendirikan usaha yang dikelolaknya dan dalam pengalamannya mengurus surat izin usaha sangat mudah dan pembiayaannya gratis.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arbeanyh selaku pelaku UMKM pemilik Salon Arbeanyh telah memiliki perizinan usaha dalam menjalankan usaha salon yang telah dikelolaknya sejak dulu dan dalam mengurus surat Izin usahanya tidak begitu membebani.⁶⁷

Dari beberapa pendapat para pelaku UMKM di atas mengenai perizinan usaha, hal yang sama juga dirasakan oleh bapak Hasri Hamza selaku pemilik usaha meubel yang

⁶⁵ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

⁶⁶ Herlina Djuhfri, S.sos, pemilik cafe Choucsuji Xunclekin, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁶⁷ Arbeanyh, pemilik salon Arbeanyh, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

memproduksi/membuat lemari, kursi, pintu dan beberapa produk lainnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Hasri Hamzah menjelaskan bahwa:

“ telah mengantongi izin usaha kayu yang telah dijalankan dan telah menghasilkan beberapa produk yang dipasarkan di dalam Kota maupun luar Kota Palopo. Jika izin usahanya telah habis masanya sekitar 5 tahun”.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan ibu Hasni Ami, A.md menjelaskan bahwa :

“usaha roti D’Find yang dijalankannya telah mendapatkan perizinan usaha, dengan adanya izin usaha yang dimilikinya membuatnya lebih leluasa untuk memasarkan hasil usahanya.”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Muh.Kaharuddin menjelaskan bahwa :” usaha kelompok Cahaya Laut yang dijalankan bersama-sama telah memiliki izin usaha dari Pemerintahan.”⁷⁰

Sementara usaha yang dijalankan oleh ibu Sarifa Daud belum memiliki izin usaha dikarenakan sementara dalam proses.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di atas, dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kota Palopo dalam mendukung aspek perizinan usaha sangat jelas terlihat melalui kemudahan perizinan. Penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi salah satu indikator yang dapat memicu masyarakat untuk mau berwirausaha serta terkhusus untuk pelaku usaha lain agar mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan.

⁶⁸ Hasri Hamzah, pemilik Usaha Meubel Hikma , *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁶⁹ Hasni Amir, A.Md, pemilik usaha D’Find, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁷⁰ Muh.Kaharuddin, Anggota Kube Cahaya Laut, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

⁷¹ Sarifa Daud, pemilik usaha penyewaan fasilitas pernikahan, *Wawancara*, Kota Palopo, Tanggal 21 Januari 2018.

Salah satu upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sistem klaster dimana merupakan suatu pengembangan dalam sistem manajemen, dimana dari usaha perseorangan yang memiliki usaha sejenis dalam satu kawasan dibentuk kelompok yang menciptakan persatuan ,sinergitas yang menjadi kekuatan dalam suatu UMKM, dengan adanya kerjasama yang baik dalam UMKM tersebut akan semakin meningkatkan pendapatan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo

Pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo kepada para pelaku UMKM di kec. Wara Timur Kel. Salotellue tentunya memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dibuat dalam beberapa program kerja yang terencana yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, maupun badan Pemerintah, yang nantinya akan diaplikasikan di lapangan. Sebelum melakukan pemberdayaan UMKM kepada masyarakat terlebih dahulu memperoleh data lapangan di sebuah daerah, kemudian memberikan fasilitas ataupun pelatihan.

Jadi, masyarakat perlu mendapatkan fasilitas dan arahan yang baik sebelum membuka sebuah usaha demi terciptanya usaha yang mampu bersaing dan menghasilkan pendapatan yang diinginkan.

Adapun pendapat peneliti mengenai system pemberdayaan UMKM di Kota Palopo ini ialah Sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dibuat dalam beberapa program kerja yang terencana yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, maupun badan Pemerintah, yang nantinya akan diaplikasikan di lapangan.

2. Hambatan Dan Solusi Dalam Melakukan Pemberdayaan UMKM Di Kec. Wara Timur Kel. Salotellue Kota Palopo

Adapun hambatan dalam UMKM yaitu: sumber daya manusia, pembiayaan atau modal dan promosi atau pemasaran produk.

Pertama Dalam hal sumber daya manusia, pelaku UMKM banyak yang memiliki pendidikan rendah sehingga sulit untuk mengatur manajemen pengolahan usaha yang dibangun. Hambatan Kedua dalam melakukan pemberdayaan UMKM yaitu dalam hal pembiayaan modal atau kurangnya modal awal dalam merintis sebuah usaha serta bahan pokok yang harganya melambung tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu lemahnya pengembangan jaringan dalam pemasaran produk terbatas akses pasar, banyaknya pesaing baik itu dari segi produk maupun dari segi harga.

Adapun Pendapat peneliti mengenai hambatan-hambatan dalam melakukan pemberdayaan UMKM ialah setiap usaha yang dijalankan pasti mempunyai hambatan, atau tantangan akan tetapi tentunya kita harus mampu menghadapi tantangan tersebut agar usaha bisa berkembang, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri.

3. Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kec. Wara Timur Kel. Salotellue Kota Palopo.

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan bantuan, baik berupa permodalan, pemasaran, pelatihan dan

pendidikan. Hal ini tidak terlepas dengan campur tangan Pemerintah daerah yang mengetahui kondisi di daerah Khususnya Kota Palopo.

Daftar bantuan usaha Dinas Koprasi UKM/ Dinas koprindag Palopo periode 2016-2017 yakni:

- a. 7 kelompok bantuan alat pertukangan, perbengkelan, mesin jahit dan peralatan home industri.
- b. 14 wirausaha pemula bantuan usaha Rp.140 juta dari Pemerintah provinsi sul-sel
- c. 100 sertifikat UKM gratis (kerjasama Diskoprindag dengan BPN dan Kemenkop UKM)
- d. 16 kelompok ukm bantuan alat pertukangan dan alat perbengkelan.
- e. 66 kelompok wirausaha pemula bantuan pelatihan usaha selama tiga bulan yang diberi honor Rp.400 ribu/bulan. Sebanyak 32 mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pembuatan proposal usaha sebesar Rp.320 juta dari Dinas Koperasi sul-sel. Setiap kelompok pemenang dapat bantuan usaha Rp. 10 juta.

Adapun pendapat peneliti mengenai upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo dari hasil penelitian dan survei yang peneliti lakukan ialah : upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo telah terlaksana baik itu berupa bantuan permodalan dalam bentuk penyaluran dana, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Pemerintah telah berupaya dalam membantu perekonomian masyarakat Kota Palopo, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ada beberapa pelaku UMKM di Kel. Salotellue telah mendapatkan tempat izin usaha, bimbingan dan pelatihan ini salah satu bukti dari upaya Pemerintah Kota Palopo dalam pemberdayaan UMKM Kota Palopo.

Adapun upaya Pemerintah yang telah dijalankan oleh wali Kota Palopo, HM Judas Amir diback-up Kepala Dinas koprindag karno, S.Sos, SKPD ini mampu mendatangkan Rp.20 miliar lebih ke daerah ini, dimana anggaran ini dipakai untuk membangun revitalisasi pasar andi tadda sebesar Rp.10 miliar, bantuan peralatan UMKM sebesar Rp. 500 juta, bantuan peralatan kepada pengusaha produksi makanan kepada 8 usaha, bantuan social Rp.150 juta kepada 3 koprasi, bantuan 100 sertifikat gratis, bantuan peralatan usaha di Pemprov sulsel Rp.300 juta, serta bantuan PLUD-UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti terhadap pemberdayaan UMKM di kec. Wara Timur Kel. Salutellue kota Palopo pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM dibuat dalam beberapa program kerja yang terencana.

Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, maupun badan pemerintah, yang nantinya akan diaplikasikan di lapangan Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di kota Palopo mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kerja guna meningkatkan pendapatan. Peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, pecipta pasar baru dan sumber inovasi serta pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur Kota Palopo .

2. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu, sumber daya manusia, Dalam hal sumber daya manusia, pelaku UMKM banyak yang memiliki pendidikan rendah sehingga sulit untuk mengatur atau pun memanajemen pengelolaan usaha yang dibangun. Sehingga perlu diberikan pelatihan untuk pelaku UMKM agar dapat mengelolah usahanya menjadi lebih baik

pembiayaan atau modal Para pelaku UMKM terkadang sulit merintis usaha disebabkan kurangnya modal atau membutuhkan modal yang cukup besar sementara mereka para pelaku UMKM tidak memiliki modal cadangan saat bahan pokok yang

digunakan harganya di pasaran tiba-tiba naik dan menyebabkan usaha yang dirintis mulai menurun. Sehingga solusi bagi para UMKM yang memiliki hambatan dalam hal pembiayaan yaitu dengan bantuan pinjaman modal baik dari lembaga swasta maupun pemerintah. seperti pinjaman modal dari bank dan koperasi

dan promosi atau pemasaran produk, Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan pemasaran yang rendah, ditambah produk yang dihasilkan terkadang jumlahnya rendah atau terbatas. Sehingga diperlukan pengembangan kemitraan yang saling membantu antar UMKM guna mempercepat proses kemitraan dalam upaya mempromosikan produk-produk di pasaran serta diadakannya pelatihan khusus agar lebih terampil untuk mengelola usahanya khususnya dalam hal pemasaran produk.

3. Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah sebagai regulator, pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut yaitu:

1. Kredit usaha rakyat(KUR),
2. Kredit ketahanan pangan dan energy (KKPE), KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.
3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik,
4. petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani(Gapoktan).

5. Kredut Usaha Pembibitan Sapi(KUPS)

Program nasioal pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)

B. *Saran*

Berdasarkan pada hasil studi penelitian pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kec. Wara Timur kota Palopo, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

4. Dinas Koperasi dan UMKM perlu meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan UMKM kepada masyarakat, sebab masih banyak pelaku UMKM yang juga menginginkan hal tersebut.
5. Bagi para pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan baik berupa modal, pelatihan maupun fasilitas diharapkan pemanfaatan dipergunakan secara optimal, dan semakin meningkatkan kinerja dalam usahanya agar pmemperoleh penghasilan yang maksimal, dan hendaknya tetap dipertahankan sampai pendapatan dari usaha yang dijalankan benar-benar dapat terus meningkat tanpa bantuan dari pemerintah lagi.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhempy, Raden Rudi dan Wismar Harianto,” *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan*”, Media Riset Bisnis dan Manajemen, vol. 1. nomor 1, April 2013.
- Ali , Faried,dkk, *Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Bandung. Refika Aditama. 2012.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2011.
- Edi , Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. Refika Aditama. 2010.
- Hadi , Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hikmat , Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press. 2001.
- Idris Yanto Niode”*Sektor UMKM Di Indonesia: Profil,Masalah, dan Strategi Pemberdayaan*”, jurnal kajian ekonomi dan bisnis OIKOS-NOMOS. Volume 2,nomor 1/ Januari 2009.ISSN 1979-1607, LPPEB FIS-UNG
- Irawan, Andi dan Bayu Airlangga Putra. *Kewirausahaan UKM.*, Cet. 1; Jakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Kuncoro, Mudjarat, *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 2010.

Muslim , Aziz,*Metodologi Pengembangan masyarakat*, Yogyakarta : Teras.
2009.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Partomo , Tiktik Sartika Dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi SkalaKecil/Menengah Dan Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Priyono, Onny dan Pranaka,*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta. Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS). 1996.

Putra, Taranggana Gani, “*Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang*”,
Kebijakan dan Manajemen Publik, 3, 1 Januari-April 2015.

Satori , Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II;
Bandung: Alfabeta, 2010.

sriyana , Jaka”*Strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM) studi kasus: Kabupaten Bantul*”,Skripsi 2010

Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean* jurnal.

Sudaryanto,Ragimun, dan rahmarina wijayanti”, *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas asean*”

Sudijono , Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cet.V: Yogyakarta.PT Raja Grafindo,1995.

Sudjana , Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Cet. I;
Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIII;Bandung: Alfabeta, 2011.

Supriyanto” *Pemberdayaan usaha mikro,kecil, dan menengah(UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan*”, jurnal Ekonomi & Pendidikan, volume 3 nomor 1, April 2006

Tambunan, Tulus T.H, *UMKM Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Tambunan, Tulus TH, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wahyuni, R Sri” *Strategi memberdayakan usaha kecil, menengah di dinas koperasi, penindustrian, dan perdagangan kabupaten sidrap*”.skipsi angkatan 25/02/2013.

Yustika, Ahmad Erani, *Perekonomian Indonesia “Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*”, Malang : Bayumedia Publishing , 2005.

Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007.